

ABSTRAK

Muhammad Djalaludin Akbar, 1213030082, 2025: *Perubahan Kebijakan Jumlah Kementerian Berdasarkan UU Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara Perspektif Siyasah Dusturiyah.* Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah).

Penelitian ini membahas mengenai kebijakan perubahan jumlah kementerian yang diawali dengan adanya perubahan terhadap UU tentang kementerian negara yakni UU Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara sehingga terbentuklah kabinet gemuk kabinet merah putih.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi terjadinya perubahan jumlah kementerian negara, menganalisis dampak dari adanya perubahan jumlah kementerian negara berdasarkan perubahan UU kementerian negara, dan bagaimana menilai hal ini dengan prespektif siyasah.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini mencakup teori perubahan hukum untuk menilai latar belakang dari perubahan UU yang dilakukan oleh pemerintah, teori kementerian (*widzarah*) untuk menilai kementerian negara yang dibentuk, teori *good governance* guna mengukur dampak dari kebijakan pemerintah, serta teori *siyasah dusturiyah* untuk mengkaji kebijakan ini dari sudut pandang etika politik Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dan dengan metode deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data deangan menganalisis peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti baik dari sumber primer maupun sekunder.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa perubahan jumlah kementerian yang terjadi dilatarbelakangi oleh tindakan politik akomodatif yang dilakukan oleh Presiden Prabowo yang kemudian mendapat legitimasi oleh DPR melalui disahkannya UU baru tentang Kementerian Negara sehingga lahirlah kabinet gemuk kabinet merah putih. Dampaknya adalah politik menjadi tidak stabil, oposisi melemah, kepentingan masyarakat tidak diperhatikan, serta kepercayaan publik terhadap pemerintah menurun. Dalam prespektif siyasah dusturiyah, segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, harus berlandaskan pada prinsip *masalah mursalah* dan bukan berdasarkan kepentingan politik saja, termasuk berkaitan dengan perubahan hukum, maupun kebijakan perubahan kementerian negara.

Kata Kunci : UU Kementerian Negara, Kabinet Merah Putih, Politik Akomodatif, Siyasah Dusturiyah